

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BERGULIR BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) GUNA Mendukung IKlim USAHA YANG KONDUSIF DI Jawa Timur (STUDI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI Jawa Timur)

Yohana Veronica Kristanti¹, Bagoes Soenarjanto², Dida Rahmadanik³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hanayovero0127@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan pilar utama penopang perekonomian di Jawa Timur. Adanya pandemi *Covid-19*, banyak pelaku UMKM mengalami kerugian, hal itu ditandai dengan menurunnya penjualan produk hingga kehilangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kapasitas untuk membangkitkan sektor UMKM dengan fasilitasi permodalan yaitu dana bergulir. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi masyarakat. Rumusan masalah bagaimana proses implementasi dan apa dampak implementasi pada UMKM di Jawa Timur. Tujuan penelitian mengetahui, menganalisis proses serta dampak implementasi kebijakan dana bergulir pada UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Situasi sosial dinyatakan sebagai obyek penelitian yaitu dana bergulir. Teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian implementasi kebijakan dana bergulir bergulir pada pelaku UMKM di Jawa Timur sudah berjalan dengan baik, mayoritas pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha, sebaiknya untuk pengajuan dana bergulir dapat diterapkan sistem online.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Bergulir, UMKM, Permodalan, Iklim Usaha

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises are the main pillars supporting the economy in East Java. Existing Covid-19 pandemic, many MSMEs actors have suffered losses, this is indicated by the decline in product sales and the loss of jobs. East Java Provincial Government has the capacity to revive MSMEs sector with capital facilitation, namely revolving fund. Based on East Java Governor Regulation Number 37 of 2020 concerning General Guidelines for the Management of Revolving fund in East Java Province, revolving fund is fund allocated by the Government for business capital strengthening activities for the community. The formulation of the problem is how the implementation process is and what is the impact of implementation on MSMEs in East Java. The purpose is to know and analyze the process and impact of implementing a revolving fund policy on MSMEs in East Java. Descriptive qualitative research method. Data collection techniques, observation, interviews, documentation, triangulation. Social situation which is stated as the object of research is revolving fund. Data analysis techniques, data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. Result of the research on the implementation of the revolving fund policy on MSMEs actors in East Java have gone well, the majority of MSMEs actors can develop their business, it is better for the application of revolving fund to apply an online system.

Keywords: MSMEs, Revolving Fund, Policy Implementation, Capital, Business Climate

PENDAHULUAN

Dengan adanya kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Indonesia pasti akan menghadapi banyak tantangan sekaligus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ekspor di wilayah Asia Tenggara, hal ini sangat berdampak pada UMKM supaya semakin berinovasi untuk mengembangkan kualitas produk lokalnya serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus Pemerintah bagi UMKM, agar dapat mewujudkan daya saing usaha hingga wilayah ASEAN. Ditambah lagi pandemi *Covid-19* yang belum usai di Indonesia menjadikan pelaku UMKM harus putar otak untuk meminimalisir krisis agar tidak sampai gulung tikar. Imbas *Covid-19* ini benar-benar dirasakan oleh para pelaku UMKM yang rata-rata mengalami kerugian hingga harus merumahkan para karyawan, padahal UMKM merupakan *backbone* atau tulang punggung untuk menopang perekonomian.

Provinsi yang termasuk dalam daerah dengan kasus *Covid-19* yang tinggi, yaitu Jawa Timur dan hingga tahun 2021 tren positif *Covid-19* semakin bertambah. Data pada Dinas Kominfo Jawa Timur menunjukkan kasus positif *Covid-19* per tanggal 14 April 2021 di Kota/Kabupaten masih berlangsung namun tingkat kesembuhan juga ikut bertambah.

Berikut data *Covid-19* di Jawa Timur

	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
KOTA SURABAYA	23,155 ⁺²¹	21,662 ⁺²¹	1,358 ¹
KAB SIDOARJO	10,984 ⁺¹³	10,315 ⁺¹⁴	617 ⁺¹
KAB JEMBER	6,824 ⁺²	6,344 ⁺²	457
KOTA MALANG	6,227 ⁺¹	5,639 ⁺¹	571 ⁺¹
KAB BANYUWANGI	5,860 ⁺⁴	5,202 ⁺¹⁵	575 ⁺²
KAB GRESIK	5,465 ⁺³	5,062 ⁺¹	352
KAB BLITAR	5,078 ⁺²⁸	4,403 ⁺¹⁵	504 ⁺⁴
KAB JOMBANG	4,618 ⁺⁸	4,071 ⁺⁷	496
KAB KEDIRI	4,531 ⁺⁷	3,996 ⁺⁷	428 ⁺²
KAB TRENGGALEK	3,568 ⁺¹⁴	3,129 ⁺²⁰	273 ⁺¹
KAB NGANJUK	3,514 ⁺⁹	3,161 ⁺¹²	305 ⁺¹
KAB PASURUAN	3,461 ⁺⁵	3,156 ⁺⁴	277
KAB TUBAN	3,451 ⁺⁷	3,028 ⁺¹	383
KAB PONOROGO	3,302 ⁺¹¹	2,995 ⁺⁷	240 ⁺⁴
KAB PROBOLINGGO	3,167	2,975	189
KAB MAGETAN	3,165 ⁺¹¹	2,790 ⁺⁹	255
KAB LUMAJANG	3,018 ⁺¹	2,750 ⁺¹	261
KAB MALANG	2,873 ⁺¹²	2,680 ⁺¹¹	179
KAB TULUNGAGUNG	2,845 ⁺¹²	2,662 ⁺¹¹	64
KAB PACITAN	2,741 ⁺⁴	2,627 ⁺⁴	65

	POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL
KAB LAMONGAN	2,699 ⁺²	2,508 ⁺³	166
KAB MADIUN	2,698 ⁺¹⁵	2,366 ⁺¹⁵	174 ⁺²
KOTA MOJOKERTO	2,562	2,347 ⁺²	176
KAB SITUBONDO	2,486 ⁺²	2,280 ⁺¹	194
KAB BOJONEGORO	2,474 ⁺¹	2,328 ⁺¹	134
KOTA BLITAR	2,435 ⁺⁴	2,314 ⁺⁷	105
KAB MOJOKERTO	2,283 ⁺⁴	2,166 ⁺¹	69
KAB BONDOWOSO	2,226 ⁺¹	2,071	146
KOTA PROBOLINGGO	2,148 ⁺²	1,994 ⁺¹	152
KOTA MADIUN	2,085 ⁺⁸	1,865 ⁺¹	134
KAB SUMENEP	1,722	1,614	108
KAB NGAWI	1,697 ⁺¹³	1,442 ⁺⁷	160 ⁺¹
KAB BANGKALAN	1,663	1,478	166
KOTA PASURUAN	1,509 ⁺⁴	1,336 ⁺²	167
KOTA BATU	1,398 ⁺¹	1,258	128
KOTA KEDIRI	1,315 ⁺¹	1,164 ⁺¹	142
KAB PAMEKASAN	1,152	1,064	87
KAB SAMPANG	898	850 ⁺²	42

Gambar 1.1 Data Kasus Covid-19 di Jawa Timur

Sumber : <http://kominfo.jatimprov.go.id/>

Berbagai stimulus kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian gencar dilakukan imbas dari *Covid-19*, khususnya

dalam pendanaan atau permodalan pada UMKM. Salah satunya dengan kebijakan dana bergulir yakni dana yang pengalokasiannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan memperkuat permodalan untuk usaha masyarakat Jawa Timur. Diharapkan, masyarakat dapat menerima bantuan permodalan dari Pemprov Jatim dengan dana bergulir yang dikelola bersama beberapa lembaga termasuk salah satunya dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Bergulir bagi UMKM guna Mendukung Iklim Usaha yang Kondusif di Jawa Timur, yang melakukan studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono (2015:99-101), ada beberapa indikator untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yakni; (1) Standar dan sasaran kebijakan; (2) Sumber daya; (3) Karakteristik agen pelaksana; (4) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Harus mempunyai kejelasan serta terarah agar bisa direalisasikan.
2. Sumber daya. Memerlukan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) serta sumberdaya non-manusia (*nonhuman resources*).
3. Karakteristik agen pelaksana. Struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, dan semuanya itu bisa mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

4. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sumber daya ekonomi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana *stakeholder* ikut mendukung implementasi kebijakan, apakah memberi dukungan atau melakukan penolakan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Konsep Dana Bergulir

Dana bergulir adalah suatu dana dimana pengalokasiannya dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dengan tujuan memperkuat modal usaha Masyarakat Jawa Timur yang tinggal di Provinsi Jawa Timur bahkan yang tinggal di luar Provinsi Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yaitu kualitatif untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah *key instrument*, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020:9). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan informasi berdasarkan pada realita maupun fakta yang diperoleh saat meneliti di lapangan. Teknik pengumpulan data antara lain, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Penelitian ini menggunakan situasi sosial yang dinyatakan sebagai obyek penelitian yaitu kebijakan dana bergulir di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data diantaranya, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Penelitian memiliki maksud untuk mendapatkan keterangan yang spesifik mengenai kapasitas Pemprov Jawa Timur guna mengimplementasikan kebijakan dana bergulir di Jawa Timur dan untuk mengetahui proses dan pengaruh kebijakan dana bergulir untuk pelaku UMKM sebagai dukungan tercapainya iklim usaha yang kondusif di Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Implementasi Kebijakan Dana Bergulir bagi UMKM

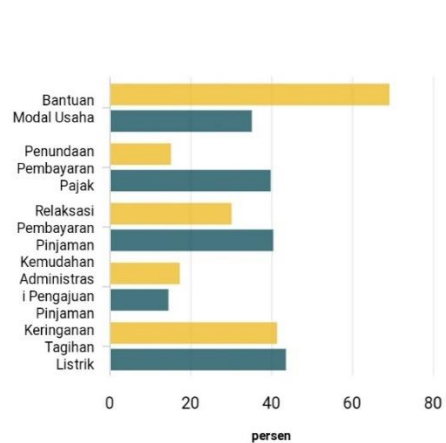
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memberikan dukungan berupa fasilitasi permodalan bagi UMKM di Jawa Timur, agar dapat membangkitkan kembali perekonomian di Jawa Timur. Maka, Pemerintah memberikan akses permodalan melalui kebijakan dana bergulir, yakni dana yang disediakan Pemerintah guna memperkuat permodalan untuk usaha bagi masyarakat Jawa Timur. Dalam proses pengimplementasian dana bergulir, indikatornya sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Pada standar dan sasaran kebijakan dana bergulir disesuaikan dengan tujuan Pemprov Jatim untuk memberikan permodalan bagi pelaku UMKM. Standar bagi para penerima dana bergulir yaitu dilihat dari kelayakan usahanya atau *track record* nya, apakah konsisten pengembangan usahanya, dan kegiatan usahanya dalam keadaan yang sehat juga produktif. Sasaran kebijakan dana bergulir pada konsep awalnya adalah untuk meminimalisir praktek-praktek rentenir, bagi para pelaku UMKM yang belum tahu sistem untuk pengajuan bantuan modal diarahkan

untuk mengajukan dana bergulir sehingga para pelaku UMKM ini tidak perlu lagi meminjam ke rentenir. Sehingga sasarannya adalah UMKM di Jawa Timur yang memerlukan bantuan permodalan dengan pinjaman bunga yang lebih rendah. Karena di waktu pandemi *Covid-19* cukup banyak UMKM yang membutuhkan bantuan modal. Berikut data dari databoks.katadata.co.id yang disurvei BPS terkait grafik jumlah pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan di saat pandemi

Bantuan yang Dibutuhkan Pelaku Usaha saat Pandemi



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Usaha mikro kecil
Usaha menengah besar

Gambar 1.2 Grafik Bantuan yang Dibutuhkan Pelaku UMKM saat Pandemi

Sumber: databoks.katadata.co.id

2. Sumber daya

Sumber daya untuk mendukung program dana bergulir, meliputi sumber daya manusia yaitu aparat pelaksana dari instansi terkait yang mengadakan sosialisasi, untuk mensosialisasikan dana bergulir kepada para pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Jawa Timur melibatkan berbagai pihak seperti aparat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota hingga melibatkan tenaga pendamping yang tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota, serta melibatkan bank pelaksana seperti bank Jatim dan bank UMKM, sebagai pihak yang mensurvey dan menyalurkan dana bergulir bagi UMKM di Jawa Timur.

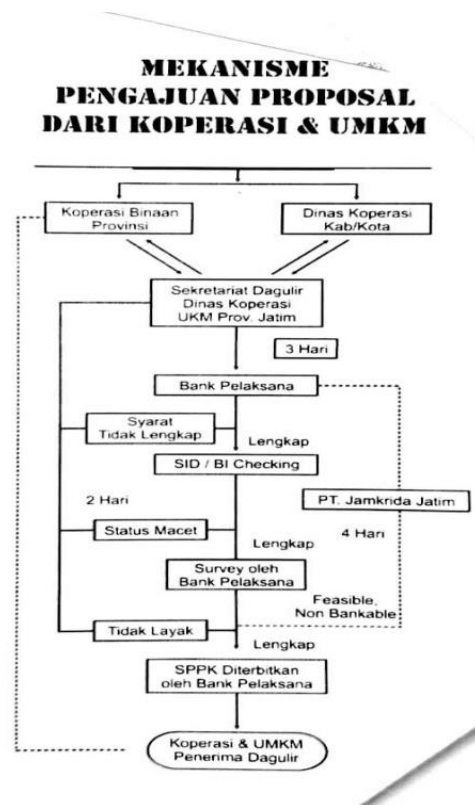
3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana atau pihak terkait dalam implementasi dana bergulir tidak terhindar dari struktur birokrasi berupa norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang kali pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur khususnya pada bidang pembiayaan. Untuk bidang pembiayaan sendiri terdapat tiga seksi yaitu, seksi fasilitasi permodalan, seksi pembiayaan dan jasa keuangan dan seksi usaha simpan pinjam, dimana ketiga seksi memiliki tupoksi masing-masing. Dana bergulir pengelolaannya melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota yang mendampingi skala usaha mikro sampai menjadi skala usaha kecil.

Kemudian untuk skala usaha kecil sampai menjadi skala usaha menengah didampingi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi. Mekanisme pengajuan dana bergulir pertama-tama diajukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota, kemudian diserahkan kepada Sekretariat dana bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur yang akan menyeleksi persyaratan administrasi selama 3 hari yang kemudian diberikan kepada bank pelaksana

untuk menyeleksi BI Checking dan bekerjasama dengan PT Jamkrida untuk menjamin penyaluran kredit dana bergulir, kemudian pihak bank pelaksana mensurvey kelayakan UMKM selanjutnya apabila UMKM tersebut telah memenuhi persyaratan maka SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) diterbitkan dan UMKM maupun Koperasi dapat menerima dana bergulir. Untuk pengajuan dana bergulir prosesnya selama 15 hari, dan masih belum menerapkan sistem pengajuan elektronik atau *online*, seperti SIPDe pada Biro perekonomian, hal itu dikarenakan jangka waktu 15 hari masih terbilang wajar, sehingga sementara sistem pengajuan masih menggunakan pola tradisional.

Berikut merupakan gambar mekanisme pengajuan proposal dana bergulir dari Koperasi dan UMKM



Gambar 1.3 Mekanisme Pengajuan

Proposal Dana Bergulir dari KUMKM

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik terkait implementasi kebijakan dana bergulir pada UMKM di Jawa Timur, melihat situasi dari lingkungan eksternal di Provinsi Jawa Timur bahwa pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi perekonomian UMKM, cukup banyak pelaku UMKM yang membutuhkan permodalan. Terlebih jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur yang terbilang cukup banyak yaitu sekitar 9,7 juta. Berikut tabel data jumlah UMKM di Jawa Timur.

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM Se-Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
Kab. Pacitan	204.785	6.810	602	212.197
Kab. Ponorogo	272.125	10.888	954	283.967
Kab. Trenggalek	237.373	8.728	513	246.614
Kab. Tulungagung	271.987	15.109	1.275	288.371
Kab. Blitar	355.301	16.504	1.642	373.447

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UMKM
Kab. Kediri	357.282	20.510	2.264	380.056
Kab. Malang	560.251	35.356	4.447	600.054
Kab. Lumajang	268.425	17.347	2.006	287.778
Kab. Jember	612.072	31.670	3.674	647.416
Kab. Banyuwangi	448.030	29.619	3.038	480.687
Kab. Bondowoso	258.544	11.207	2.042	271.793
Kab. Situbondo	205.532	9.900	1.610	217.042
Kab. Probolinggo	314.876	16.363	2.214	333.453
Kab. Pasuruan	338.175	21.273	2.782	362.230
Kab. Sidoarjo	212.754	31.345	4.207	248.306
Kab. Mojokerto	197.791	16.956	1.771	216.518
Kab. Jombang	278.530	18.882	1.862	299.273
Kab. Nganjuk	274.290	12.582	1.247	288.119
Kab. Madiun	183.680	7.653	546	191.880

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UM KM
Kab. Magetan	171.7 12	9.17 0	878	181.7 60
Kab. Ngawi	242.7 13	10.4 48	710	253.8 70
Kab. Bojonegoro	358.4 19	16.1 10	1.787	376.3 16
Kab. Tuban	295.6 41	20.5 59	3.276	319.4 77
Kab. Lamongan	288.9 22	20.9 82	2.471	312.3 76
Kab. Gresik	202.1 90	20.0 04	3.048	225.2 42
Kab. Bangkalan	240.2 62	7.87 1	532	248.6 64
Kab. Sampang	220.3 18	8.97 5	351	229.6 44
Kab. Pamekasan	238.3 00	8.47 1	498	247.2 69
Kab. Sumenep	382.9 73	17.3 69	868	401.2 10
Kota Kediri	39.98 3	4.82 8	818	45.62 9
Kota Blitar	26.22 5	2.54 5	353	29.12 3
Kota Malang	99.68 2	16.0 17	2.141	117.8 40
Kota Probolinggo	39.22 3	3.73 3	522	43.47 8

Kabupaten/Kota	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah UM KM
Kota Pasuruan	30.84 2	4.20 9	545	35.59 6
Kota Mojokerto	15.97 4	2.61 4	407	18.99 5
Kota Madiun	32.45 6	3.52 9	570	36.55 5
Kota Surabaya	316.2 03	59.0 10	9.840	385.0 54
Kota Batu	40.01 5	4.42 3	525	44.96 3
Total	9.133 .859	579. 567	68.83 5	9.782 .262

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur

Dampak Implementasi Kebijakan Dana Bergulir pada UMKM

Kebijakan dana bergulir yang diimplementasikan di Jawa Timur bagi para pelaku UMKM, diharapkan dapat memiliki dampak positif bagi perekonomian di Jawa Timur, sehingga UMKM dapat lebih berdaya saing dan bangkit kembali dari kesulitan ekonomi yang diakibatkan *Covid-19*. Dampak dari implementasi kebijakan dana bergulir pada UMKM disesuaikan dengan indikator, sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dampak dari implementasi kebijakan dana bergulir pada standar dan sasaran kebijakan dana bergulir. Dampaknya menyerap tenaga kerja dan meminimalisir jumlah pengangguran, para pelaku UMKM

yang belum memenuhi syarat perbankan atau yang *feasible* tetapi belum *bankable* dapat memperoleh fasilitasi permodalan. Untuk indikator kinerja keberhasilan bagi UMKM, yaitu dilihat dari semakin banyaknya UMKM yang naik kelas atau skala usahanya semakin meningkat, seperti usaha mikro yang dapat meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil, kemudian usaha kecil menjadi usaha menengah.

2. Sumber daya

Dampak implementasi kebijakan dana bergulir terhadap sumber daya, maka pengaruhnya bagi UMKM, melalui dana bergulir dapat meningkatkan sumber daya finansial sebagai modal usaha bagi masyarakat pelaku UMKM serta dapat memperluas lapangan kerja. Selain itu, berpengaruh pada peningkatan kapasitas jumlah aparat pelaksana sebagai pihak yang terlibat untuk memfasilitasi dana bergulir, perlu melibatkan tenaga pendamping untuk memberikan sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Jawa Timur.

3. Karakteristik agen pelaksana

Dampak implementasi dana bergulir pada karakteristik agen pelaksana, antara lain struktur birokrasinya, norma atau aturan, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang kali pada birokrasi, yaitu dalam mengerjakan proses dana bergulir, bahwa dana tersebut bersumber dari APBD sehingga pihak birokrasi pengelola harus melakukan prosedur berdasarkan pada regulasi yang berlaku, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur memiliki fungsi seleksi administratif, yaitu berperan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan dana bergulir selain itu berperan

pula dalam pendampingan dan monitoring pada UMKM yang telah menerima dana bergulir.

4. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Dampak implementasi kebijakan dana bergulir terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik, dapat mendukung iklim usaha yang kondusif yaitu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berdampak pula dalam mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur karena didukung dengan permodalan dana bergulir sekaligus menjadikan UMKM lebih berdaya saing. Kemudian karena jumlah pelaku UMKM yang sangat banyak di Jawa Timur maka dampak dari implementasi dana bergulir ini memerlukan stakeholder yang harus terlibat untuk melakukan pembinaan UMKM, saat ini terdapat kelompok-kelompok kepentingan atau elite politik yang ikut mendukung program dana bergulir seperti BUMN, Lembaga Pemasyarakatan hingga Pemerhati UMKM.

KESIMPULAN

Bahwa pada proses dan dampak implementasi dana bergulir disesuaikan dengan standar kebijakan yaitu pelaku UMKM yang memiliki kelayakan usaha yakni keadaan usahanya sehat dan produktif boleh mengajukan dana bergulir, kemudian dampak yang muncul yaitu skala usaha para pelaku UMKM mengalami peningkatan seperti usaha mikro menjadi usaha kecil, kemudian usaha kecil menjadi usaha menengah. Sasaran kebijakannya mendukung iklim usaha yang kondusif, yaitu iklim usaha yang mendorong UMKM untuk berinvestasi atau meminjam modal dengan

biaya dan resiko sekecil-kecilnya namun memperoleh profit jangka panjang, dampak yang muncul dari implementasi dana bergulir yaitu peningkatan jumlah UMKM yang memperoleh dana bergulir dengan bunga pinjaman rendah. Sementara untuk sumber daya manusianya melibatkan aparat pemerintah mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota dan tenaga pendamping, dampak yang muncul yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia dari pihak instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan akses pengajuan dana bergulir, kemudian dampak lainnya yaitu peningkatan kebutuhan permodalan atau sumber daya finansial bagi pelaku UMKM. Karakteristik agen pelaksana atau pihak yang terlibat dalam implementasi dana bergulir tidak terlepas dari struktur birokrasi pada bidang pembiayaan terdiri dari tiga seksi yang meliputi, seksi fasilitasi permodalan, seksi pembiayaan dan jasa keuangan dan seksi usaha simpan pinjam, maka dampak yang muncul yaitu masing-masing seksi pada bidang pembiayaan selaku agen pelaksana saling berintegrasi untuk memeriksa pihak yang memenuhi persyaratan dalam menerima dana bergulir yang telah dilakukan sesuai prosedur pedoman umum pengelolaan dana bergulir. Melihat situasi dari lingkungan eksternal di Provinsi Jawa Timur bahwa pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi perekonomian UMKM, yaitu banyak pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan, dana bergulir dapat menjadi salah satu opsi untuk memperoleh pinjaman dana. Sehingga dampak yang muncul pada kondisi ekonomi, sosial dan politik yaitu

peningkatan pendapatan para pelaku UMKM, dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, selain itu pihak elit politik juga ikut terlibat dalam memberi sosialisasi dana bergulir kepada para pelaku UMKM seperti BUMN hingga lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, T. W. (2005). *Iklm Investasi yang Lebih Baik bagi Setiap Orang, Laporan Pembangunan Dunia 2005, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Drs. AG Subarsono, M. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Tambunan, T. (2006). *Iklm Investasi di Indonesia : Masalah Tantangan dan Potensi*. . Jakarta: Kadin-Indonesia - Jetro.
- Mawardi, R. H. (2017). KEBIJAKAN PERLUASAN AKSES PEMBIAYAAN pada USAHA KECIL dan MENENGAH (UKM) di JAWA TIMUR . *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 50 No. 5 September 2017*, 73-80.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur
- Kominfo.jatimprov.go.id (2021, 14 April). Data Kasus Covid-19 di

Jawa Timur. Diakses pada 15 April 2021, dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/>

databoks.katadata.co.id (2020, 24 September). 5 Jenis Bantuan yang Dibutuhkan UMKM

selama Pandemi. Diakses pada 28 Juni 2021, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/24/5-jenis-bantuan-yang-dibutuhkan-umkm-selama-pandemi>